

Determinan Penentu Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur

Hanadia Zahra

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: hanadiazahra.22007@mhs.unesa.ac.id

Prayudi S. Prabowo

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: prayudiprabowo@unesa.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2019-2023, terutama akibat pandemi COVID-19, yang menuntut pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten/kota Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) pada data tahun 2019-2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara IPM berpengaruh positif dan signifikan. Namun, TPAK tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan IPM berperan sebagai faktor kunci yang memoderasi hubungan tersebut. Kesimpulan penelitian ini mengonfirmasi Teori Pertumbuhan Endogen dan memberikan implikasi kebijakan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pembangunan yang terintegrasi antara kebijakan upah, peningkatan kualitas SDM, dan penciptaan lapangan kerja yang produktif.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Partisipasi Angkatan Kerja*

Kode JEL: *O15, O47, J31*

Abstract

Economic growth in East Java experienced significant fluctuations during the 2019-2023 period, primarily due to the COVID-19 pandemic, which demands a deep understanding of the determinants of regional economic growth. This study aims to analyze the influence of District/City Minimum Wage (UMK), Human Development Index (IPM), and Labor Force Participation Rate (TPAK) on economic growth in 38 districts/cities of East Java. The method used is panel data regression with a Fixed Effect Model (FEM) approach on 2019-2023 data obtained from the Central Statistics Agency of East Java. The results show that UMK has a negative and significant effect on economic growth, while IPM has a positive and significant effect. However, TPAK shows no significant effect. Simultaneously, the three variables have a significant effect on economic growth with IPM acting as a key factor moderating this relationship. The conclusion of this study confirms the Endogenous Growth Theory and provides important policy implications for local governments in designing integrated

How to cite: Zahra, H., & Prabowo, P. S. (2026). Determinan Penentu Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*. 6(1). 39-60

development strategies between wage policies, improving human resource quality, and creating productive employment.

Keywords: *Economic Growth, Minimum Wage, Human Development Index, Labor Force Partisipation*

JEL Classification: *O15, O47, J31*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa aktivitas produksi dan distribusi berjalan secara efektif sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Dalam kajian ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai peningkatan output semata, tetapi juga sebagai proses jangka panjang yang mencerminkan kualitas pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan yang tinggi namun tidak disertai dengan peningkatan kualitas kesejahteraan dan kesempatan kerja berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, analisis pertumbuhan ekonomi perlu mempertimbangkan faktor-faktor struktural yang memengaruhinya (Sukirno, 2018).

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi, tenaga kerja, serta tingkat produktivitas. Namun, perkembangan pemikiran ekonomi modern menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik dan kualitas sumber daya manusia. Efektivitas kebijakan pembangunan menentukan sejauh mana faktor produksi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Sukirno, 2018).

Selain dari sisi faktor produksi, literatur ekonomi modern menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia juga memainkan peran penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan tenaga kerja menghadapi tantangan ekonomi (Utami, 2020). Teori pertumbuhan juga menempatkan kualitas modal manusia sebagai determinan yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tenaga kerja yang sehat, terdidik, dan terampil akan cenderung lebih produktif sehingga dapat memperkuat basis pertumbuhan di suatu wilayah (Utami, 2020).

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS Jatim (2023), kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 14–15%, menjadikannya sebagai penyumbang terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Struktur ekonomi di Jawa Timur relatif beragam, dengan dominasi sektor industri pengolahan, perdagangan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi daerah.

Selama periode 2019–2023, perekonomian Provinsi Jawa Timur menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh guncangan eksternal akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan perekonomian Jawa Timur relatif responsif terhadap guncangan ekonomi nasional dan global. Pada periode pra-pandemi, yaitu tahun 2019, kinerja ekonomi Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berada pada kisaran di atas 5%. Stabilitas ini mencerminkan kuatnya aktivitas produksi dan konsumsi domestik, serta peran sektor industri dan perdagangan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh perbaikan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

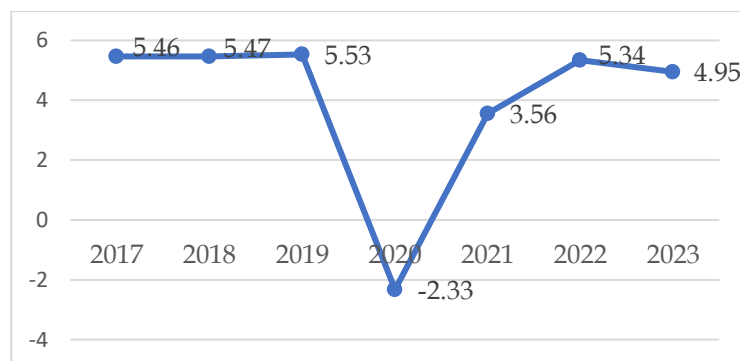
Namun, pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi yang cukup dalam sebagai dampak langsung dari pandemi. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi menyebabkan penurunan produksi, terganggunya rantai pasok, serta melemahnya daya beli masyarakat. Hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, terutama di wilayah dengan basis industri pengolahan dan perdagangan yang tinggi (Suryahadi *et al.*, 2020).

Dampak pandemi tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga memperlebar kesenjangan kinerja ekonomi antar wilayah. Kabupaten/kota dengan struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan kapasitas fiskal yang lebih baik cenderung lebih mampu bertahan, sementara daerah dengan ketergantungan tinggi pada sektor informal dan pertanian mengalami tekanan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah menjadi faktor penting dalam menentukan daya tahan terhadap guncangan eksternal (BPS, 2021).

Memasuki periode 2021-2023, perekonomian Jawa Timur mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan secara bertahap. Pelonggaran pembatasan aktivitas, peningkatan mobilitas masyarakat, serta berbagai kebijakan stimulus ekonomi mendorong kembali aktivitas produksi dan konsumsi. Meskipun demikian, laju pemulihan tidak berlangsung merata antar kabupaten/kota, mencerminkan perbedaan kapasitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia antar wilayah.

Pemulihan ekonomi yang tidak seragam tersebut juga berkaitan erat dengan kondisi pasar tenaga kerja. Daerah dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mengalami pemulihan yang lebih cepat. Hal ini mempertegas peran penting pembangunan manusia dalam mendukung ketahanan dan pemulihan ekonomi daerah (Sukirno, 2018).

Dengan demikian, dinamika perekonomian Jawa Timur selama periode penelitian memberikan konteks penting dalam menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi. variasi kondisi ekonomi antar wilayah dan antar waktu menjadi dasar yang kuat untuk menggunakan pendekatan panel dalam penelitian ini.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur
Sumber: BPS Jatim (data diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada periode 2017–2019 berada pada kisaran 5% per tahun. Namun, pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,33% akibat pandemi COVID-19, sebelum kembali mengalami pemulihan menjadi 3,56% pada tahun 2021, meningkat menjadi 5,34% pada tahun 2022, dan berada pada kisaran 4,95% pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh guncangan eksternal sekaligus menggambarkan proses pemulihan ekonomi daerah secara bertahap.

Perlambatan tersebut tidak hanya berpengaruh pada total output, tetapi juga pada aspek ketenagakerjaan. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM yang terdampak, mengalami kesulitan mempertahankan level produksi serta jumlah tenaga kerja. Akibatnya, ketidakpastian pasar tenaga kerja meningkat dan memperlambat proses pemulihan ekonomi daerah (BPS Jatim, 2021).

Selain itu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah juga mengalami tekanan yang signifikan selama periode pandemi. Dalam kurun waktu 2019–2023, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur berada pada kisaran 57% hingga 59%, yang menunjukkan bahwa stabilitas sektor ini sangat menentukan kinerja pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan upah minimum menjadi salah satu instrumen penting yang dirancang untuk melindungi daya beli pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan tidak hanya sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai bagian dari kerangka kebijakan pasar tenaga kerja regional.

Kebijakan UMK memiliki implikasi yang kompleks bagi dinamika ekonomi. Beberapa studi empiris menemukan bahwa kenaikan UMK dapat memperbaiki pendapatan pekerja dan mendorong konsumsi rumah tangga. Namun, ada pula temuan yang menunjukkan bahwa kondisi kenaikan upah yang tidak seimbang dengan produktivitas dapat membatasi daya saing usaha kecil dan menekan penyerapan tenaga kerja (Suryahadi *et al.*, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Hanifa (2024) menemukan bahwa variabel upah minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap

ketimpangan pendapatan di Jawa Timur pada periode 2019-2023, meskipun dinamika ini juga dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang lebih kompleks.

Berbeda dengan fokus ketimpangan, studi lain menunjukkan bahwa IPM, UMK, dan pertumbuhan ekonomi saling terkait dalam memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di wilayah lain di Pulau Jawa. Hasil ini memperkuat bukti bahwa hubungan antarvariabel ekonomi tidak bersifat linier dan sangat bergantung pada kondisi regional masing-masing (Amalia *et al.*, 2024).

Selanjutnya, IPM dan upah minimum tidak hanya berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Penelitian lain di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa variabel tersebut memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, menegaskan keterkaitan antara kualitas sumber daya manusia, kebijakan upah, dan keterlibatan angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi (Solicha *et al.*, 2024).

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Solihah & Ariesetyawan (2025) tentang penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja dan IPM justru memberikan kontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Temuan-temuan tersebut mempertegas bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak hanya berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memengaruhi berbagai dimensi lain seperti ketimpangan, pengangguran, dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan kompleksitas interaksi antara struktur ekonomi dan kebijakan publik di tingkat regional.

Di sisi lain, terdapat kesenjangan pembangunan antarwilayah di Jawa Timur yang tercermin dari perbedaan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Daerah perkotaan seperti Surabaya memiliki IPM yang relatif tinggi, sedangkan beberapa daerah di wilayah tapal kuda dan Madura masih memiliki IPM yang lebih rendah. Perbedaan ini mengindikasikan adanya ketimpangan kualitas sumber daya manusia yang berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Di samping dinamika interaksi variabel, kondisi pasar tenaga kerja Indonesia, termasuk di Jawa Timur, juga dipengaruhi oleh kualitas pekerjaan yang tersedia. Tingginya partisipasi kerja belum tentu mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat apabila tenaga kerja terserap dalam sektor berproduktivitas rendah.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang beragam, beberapa menemukan pengaruh positif, sementara yang lain menunjukkan keterbatasan dampak apabila kualitas tenaga kerja rendah atau tidak terserap dalam struktur ekonomi yang produktif (Faruq, 2024; Rabbani & Hasmarini, 2024).

Perbedaan hasil empiris tersebut menegaskan bahwa hubungan antarvariabel ekonomi tidak sederhana, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual pada tingkat regional. Pendekatan semacam ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan struktural.

Berdasarkan permasalahan dan dinamika ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya, analisis pertumbuhan ekonomi daerah perlu di dasarkan pada kerangka teori yang mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan ketenagakerjaan, kualitas sumber daya manusia, dan kinerja ekonomi wilayah. Dalam konteks ini, penelitian mengacu pada pendekatan teori pertumbuhan ekonomi yang menekankan keterkaitan antara faktor produksi, produktivitas, dan kebijakan publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain kebijakan upah, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor fundamental dalam proses pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan struktur ekonomi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dalam kerangka teori ini dipahami sebagai indikator kesediaan tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Kerangka berpikir ini menekankan bahwa hubungan antara Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat saling terkait. Dampak kebijakan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas modal manusia, sementara efektivitas partisipasi angkatan kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bergantung pada tingkat pendidikan dan kesehatan kerja.

Dengan demikian, IPM diposisikan sebagai variabel kunci yang dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh UMK dan TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah dengan IPM yang tinggi cenderung mampu menyerap kenaikan upah minimum secara lebih efektif dan memanfaatkan partisipasi tenaga kerja untuk meningkatkan output ekonomi. Sebaliknya, pada daerah dengan IPM yang rendah, kenaikan UMK dan tingginya TPAK berpotensi menimbulkan tekanan terhadap dunia usaha dan dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun untuk menjelaskan keterkaitan antara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ketiga variabel tersebut dipilih karena merepresentasikan aspek kebijakan ketenagakerjaan, kualitas sumber daya manusia, serta dinamika pasar tenaga kerja yang secara teoritis dan empiris memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik yang secara langsung memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Dari sisi pekerja, kenaikan UMK dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga mendorong konsumsi rumah tangga sebagai salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, dari sisi pelaku usaha, kenaikan UMK juga berpotensi meningkatkan biaya produksi yang dapat memengaruhi keputusan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pengaruh UMK terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha dalam menyesuaikan struktur biayanya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, TPAK menunjukkan sejauh mana potensi tenaga kerja dimanfaatkan dalam proses produksi. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin besar pula potensi peningkatan output ekonomi. Namun demikian, tingginya TPAK tidak secara otomatis menjamin peningkatan pertumbuhan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kualitas tenaga kerja yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas tenaga kerja perlu didukung oleh kualitas yang baik agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketiga variabel tersebut tidak hanya berpengaruh secara parsial, tetapi juga memiliki hubungan yang saling berinteraksi. IPM, sebagai indikator kualitas sumber daya manusia, berperan dalam menentukan bagaimana dampak UMK dan TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada daerah dengan IPM yang tinggi, kenaikan UMK cenderung dapat diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga tidak menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap biaya produksi. Sebaliknya, pada daerah dengan IPM yang rendah, kenaikan UMK berpotensi menjadi beban bagi pelaku usaha karena tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, efektivitas TPAK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh IPM. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila tenaga kerja yang tersedia memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sebaliknya, apabila kualitas tenaga kerja rendah, maka tingginya partisipasi angkatan kerja justru berpotensi meningkatkan pengangguran terselubung dan menurunkan produktivitas secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, hubungan antara UMK, IPM, dan TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai suatu sistem yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. UMK memengaruhi sisi permintaan dan biaya produksi, IPM menentukan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sedangkan TPAK mencerminkan ketersediaan tenaga kerja dalam proses produksi. Interaksi ketiga variabel tersebut akan menentukan kinerja pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Lebih lanjut, perbedaan karakteristik antarwilayah di Provinsi Jawa Timur juga menjadi faktor penting yang memengaruhi hubungan antar variabel tersebut. Daerah dengan tingkat industrialisasi yang tinggi dan IPM yang relatif baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menyerap tenaga kerja dan mengoptimalkan kebijakan upah minimum. Sebaliknya, daerah dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor tradisional dan kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh satu variabel tunggal, tetapi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kebijakan ketenagakerjaan, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi tenaga kerja. Kerangka berpikir ini menjadi dasar dalam penyusunan model empiris yang digunakan untuk menguji pengaruh UMK, IPM, dan TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan pendekatan

ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah serta implikasinya terhadap perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kerangka berpikir ini berperan sebagai indikator utama kualitas sumber daya manusia. IPM mencerminkan dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang secara langsung memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kondisi kesehatan yang baik, serta kemampuan adaptasi yang memadai cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan output yang lebih besar. Dengan demikian, IPM tidak hanya berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai faktor penguat (*enabling factor*) yang menentukan efektivitas variabel lain, khususnya UMK dan TPAK.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan adalah data panel agar dapat menangkap variasi antarwilayah dan antarwaktu secara komprehensif (Wooldridge, 2016).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap literatur ekonomi regional dan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah daerah merumuskan strategi pembangunan yang seimbang antara perlindungan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menjelaskan pengaruh variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menguji hubungan kausal antar variabel secara objektif dan terukur melalui analisis statistik dan ekonometrika (Sugiyono, 2023).

Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian eksplanatori memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi sejauh mana perubahan pada variabel UMK, IPM, dan TPAK dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur secara empiris.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Pemilihan data sekunder dilakukan karena data yang dipublikasikan oleh BPS telah melalui proses pengumpulan dan verifikasi secara sistematis sehingga memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang tinggi untuk keperluan analisis ilmiah.

Data yang dikumpulkan mencakup data pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten kota, indeks pembangunan manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja

pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Periode penelitian ditetapkan selama lima tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023, sehingga total observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 190 observasi.

Pemilihan periode 2019-2023 didasarkan pada pertimbangan bahwa periode tersebut mencakup tiga fase penting dalam dinamika perekonomian daerah, yaitu sebelum pandemi COVID-19, masa pandemi, dan masa pemulihan pasca pandemi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menangkap perubahan struktur ekonomi dan pasar tenaga kerja yang terjadi selama periode tersebut secara lebih komprehensif.

Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel, yaitu gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Penggunaan data panel memberikan keunggulan dalam analisis karena mampu menangkap variasi antar wilayah dan antar waktu secara simultan, serta meningkatkan efisiensi estimasi dibandingkan dengan penggunaan data *time series* atau *cross-section* secara terpisah (Wooldridge, 2016).

Selain itu, penggunaan regresi data panel memungkinkan peneliti untuk mengontrol heterogenitas yang tidak teramati antar kabupaten/kota, seperti perbedaan karakteristik ekonomi, sosial, dan institusional yang relatif konstan sepanjang waktu. Dengan demikian, potensi bias estimasi akibat variabel yang tidak terukur dapat diminimalkan sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Variabel independen meliputi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk mengurangi masalah skala data dan menstabilkan varians, variabel UMK ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural. Transformasi ini juga bertujuan untuk memudahkan interpretasi koefisien regresi dalam bentuk elastisitas parsial

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 \ln UMK_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

- PE_{it} : Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota ke-*i* pada tahun ke-*t*
- α : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen
- $\ln UMK_{it}$: Upah Minimum Kabupaten/Kota dalam bentuk logaritma natural pada kabupaten/kota ke-*i* pada tahun ke-*t*
- IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota ke-*i* pada kabupaten/kota ke-*i* pada tahun ke-*t*
- $TPAK_{it}$: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada kabupaten/kota ke-*i* pada kabupaten/kota ke-*i* pada tahun ke-*t*
- e_{it} : Error term

Pemilihan model regresi data panel terbaik dilakukan melalui uji Chow untuk menentukan apakah model *Common Effect* atau *Fixed Effect* lebih sesuai, serta uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Model *Fixed Effect* digunakan apabila hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang signifikan antar kabupaten/kota. Setelah model terbaik diperoleh, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan bahwa model estimasi memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen (Wooldridge, 2016b).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Data Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data variabel penelitian tanpa menyajikannya dalam bentuk tabel. Selama periode 2019–2023, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada masa pra-pandemi, pertumbuhan ekonomi daerah berada pada kisaran 5–6 persen per tahun. Namun pada tahun 2020, sebagian besar kabupaten/kota mengalami kontraksi ekonomi dengan laju pertumbuhan mencapai sekitar -2 hingga -3 persen. Memasuki periode pemulihan 2021–2023, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat secara bertahap dengan kisaran 3–5 persen, meskipun belum sepenuhnya merata antar wilayah.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) selama periode penelitian menunjukkan tren meningkat secara konsisten. Secara umum, UMK di Jawa Timur berada pada kisaran sekitar Rp1,8 juta hingga lebih dari Rp4,5 juta per bulan. Kabupaten/kota dengan basis industri dan aktivitas ekonomi yang kuat, seperti wilayah metropolitan dan kawasan industri, cenderung memiliki UMK yang lebih tinggi, sementara daerah dengan dominasi sektor pertanian dan informal memiliki UMK yang relatif lebih rendah. Perbedaan ini mencerminkan variasi kapasitas ekonomi dan produktivitas antar daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur selama periode 2019–2023 berada pada kisaran sekitar 66 hingga di atas 80. Secara umum, IPM menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan adanya perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Namun demikian, kesenjangan IPM antar kabupaten/kota masih terlihat, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan, yang menunjukkan bahwa hasil pembangunan manusia belum sepenuhnya merata.

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur relatif stabil selama periode penelitian dengan kisaran sekitar 64–72 persen. Beberapa kabupaten/kota mencatat TPAK yang tinggi akibat dominasi sektor informal dan tingginya kebutuhan ekonomi rumah tangga, sedangkan daerah lain menunjukkan TPAK yang lebih rendah namun dengan struktur pekerjaan yang relatif lebih formal dan produktif.

Gambaran statistik deskriptif tersebut menunjukkan bahwa data penelitian memiliki variasi yang cukup besar baik antar waktu maupun antar wilayah. Variasi inilah yang menjadi dasar pemilihan metode regresi data panel, karena mampu menangkap perbedaan karakteristik masing-masing kabupaten/kota serta dinamika perubahan variabel penelitian sepanjang periode pengamatan.

Hasil Pemilihan Model dan Uji Asumsi Klasik

Pemilihan model data panel dilakukan melalui serangkaian uji statistik. Hasil Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas 0,0000 yang mengindikasikan penolakan terhadap model Common Effect.

Tabel 1 Ringkasan Uji Hasil Pemilihan Model

Model	Prob > F	R ² within	R ² Between	R ² Overall
FEM	0.0000	0,2019	0,1171	0,0576
REM	0.0184	0.0508	0.2221	0.0511

Sumber: hasil olah data oleh peneliti, Stata 14

Setelah dilakukan uji hausman model yang terpilih adalah Fixed Effect, maka uji lagrange multiplier tidak perlu dilakukan. Sebelum melakukan estimasi, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan keabsahan hasil regresi.

Tabel 2 Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji Asumsi Klasik	Metode Pengujian	Hasil Uji	Kriteria	Kesimpulan
Uji Multikolinearitas	Variance Inflation Factor (VIF)	Nilai VIF <10	Tidak terjadi gejala multikolinearitas	Model bebas multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas	Uji Breusch – Pagan / White	Probabilitas > 0.05	Tidak terjadi heteroskedastisitas	Model homoskedastis
Uji Autokorelasi	Uji Wooldridge	Probabilitas > 0.05	Tidak terjadi autokorelasi	Model bebas autokorelasi

Sumber: hasil olah data oleh peneliti, Stata 14

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan koefisien regresi dan menyulitkan interpretasi pengaruh masing-masing variabel independen. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel independen.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (ln UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berada di bawah batas toleransi 0,80. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami permasalahan multikolinearitas dan setiap variabel independen dapat menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi secara independen.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians error dalam model regresi bersifat konstan atau tidak. Apabila terjadi heteroskedastisitas, maka estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien dan dapat menghasilkan kesimpulan yang bias. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan pada model Fixed Effect yang terpilih.

Hasil uji heteroskedastisitas pada menghasilkan nilai p-value sebesar 0,8406 yang jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol yang menyatakan adanya homoskedastisitas (variens residual konstan) tidak ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, sehingga estimator yang dihasilkan bersifat efisien dan valid untuk inferensi statistik.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara error pada periode waktu yang berbeda dalam model regresi data panel. Autokorelasi sering terjadi pada data runtut waktu dan dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak efisien. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji autokorelasi yang sesuai untuk data panel.

Uji autokorelasi Wooldridge pada Tabel 6 menghasilkan p-value sebesar 0,6589 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya autokorelasi serial orde pertama dalam residual model. Dengan demikian, model yang diestimasi tidak mengalami masalah autokorelasi, yang merupakan salah satu asumsi penting untuk memastikan keefisienan estimator dalam analisis data panel.

Berdasarkan ketiga uji asumsi klasik di atas, dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, sehingga estimator yang dihasilkan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Hasil Estimasi Model Data Panel

Hasil estimasi menggunakan model Fixed Effect menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,4769, yang berarti bahwa variabel independen dalam model mampu menjelaskan 47,69% variasi pertumbuhan ekonomi setelah mengontrol efek tetap antar kabupaten/kota.

Tabel 3 Hasil Estimasi Model Data Panel

pe	Coef.	Std. Err	P> t
log(umk)	-68.94	12.98016	0.000
ipm	5.515333	0.4883896	0.000
tpak	0.014417	0.0966833	0.882
R^2 Within	0.4769		
Prob	0.0000	F-statistik 33,73	

Sumber: hasil olah data oleh peneliti

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setelah ditransformasi logaritma berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien -68,94, pada tingkat signifikansi 1%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 5,515, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak signifikan secara statistik dengan p-value 0,882. Uji simultan menghasilkan nilai F-statistik 33,73 dengan probabilitas 0,000,

yang mengindikasikan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan salah satu instrumen kebijakan pasar tenaga kerja yang memiliki implikasi langsung terhadap aktivitas ekonomi daerah. Penetapan UMK bertujuan untuk melindungi tenaga kerja agar memperoleh pendapatan yang layak, namun dalam praktiknya kebijakan ini juga memengaruhi struktur biaya produksi, keputusan investasi, serta kemampuan pelaku usaha dalam melakukan ekspansi. Oleh karena itu, pengaruh UMK terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks dan tidak selalu linier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Jawa Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa kenaikan UMK cenderung menekan laju pertumbuhan ekonomi daerah selama periode penelitian. Hasil tersebut memperkuat argumen bahwa kebijakan pengupahan, khususnya di daerah dengan struktur ekonomi yang belum sepenuhnya kuat, dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak diinginkan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas.

Secara teoritis, pengaruh negatif UMK terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui mekanisme peningkatan biaya produksi. Kenaikan UMK menyebabkan biaya tenaga kerja meningkat, yang merupakan salah satu komponen utama biaya produksi, terutama pada sektor padat karya. Ketika biaya produksi meningkat, pelaku usaha cenderung mengurangi skala produksi atau menahan ekspansi usaha, sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi Comola & de Mello (2017) serta Magruder (2020) yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum di Indonesia dapat menekan kinerja usaha dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Studi-studi tersebut menegaskan bahwa dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, memiliki keterbatasan dalam menyerap kenaikan biaya tenaga kerja tanpa dukungan peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Selain itu, pengaruh negatif UMK juga berkaitan dengan elastisitas permintaan tenaga kerja. Ketika upah meningkat, perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja atau menggantinya dengan teknologi yang lebih hemat biaya. Kondisi ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja melambat dan pada akhirnya menekan output ekonomi. Mekanisme ini sejalan dengan analisis elastisitas permintaan tenaga kerja yang dikemukakan oleh Lichter *et al.*, (2016) yang menekankan bahwa respons perusahaan terhadap kenaikan upah sangat bergantung pada struktur biaya dan tingkat produktivitas.

Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, heterogenitas kondisi ekonomi antar kabupaten/kota memperkuat dampak kebijakan UMK terhadap pertumbuhan ekonomi. Kabupaten/kota dengan basis industri dan produktivitas relatif tinggi lebih mampu menyesuaikan diri terhadap kenaikan UMK. Sebaliknya, daerah yang

perekonomiannya masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan kecil, dan usaha mikro cenderung lebih rentan terhadap kenaikan biaya akibat kenaikan upah minimum.

Hal ini sejalan dengan temuan Rabbani & Hasmarini (2024) yang menekankan bahwa karakteristik regional memainkan peran penting dalam menentukan dampak kebijakan upah minimum. Kebijakan UMK yang seragam secara administratif berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara tingkat upah dan kemampuan dunia usaha di daerah tertentu, sehingga berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi lokal.

Ketidaksesuaian tersebut dapat mendorong terjadinya distorsi di pasar tenaga kerja, khususnya pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal. Sektor informal umumnya memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah dan kontribusi yang terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini mendukung pandangan Sukirno (2016) yang menyatakan bahwa distorsi pasar tenaga kerja dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan memperlemah struktur ekonomi daerah.

Meskipun demikian, pengaruh negatif UMK terhadap pertumbuhan ekonomi tidak serta merta meniadakan peran penting kebijakan upah minimum sebagai instrumen perlindungan tenaga kerja. UMK tetap diperlukan untuk menjaga daya beli dan standar hidup pekerja, terutama di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Dalam jangka pendek, peningkatan UMK juga dapat menopang konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen penting dalam permintaan agregat.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan UMK sangat bergantung pada kondisi struktural perekonomian daerah. Agar UMK dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan pengupahan perlu diiringi dengan produktivitas tenaga kerja, penguatan kapasitas usaha, serta pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Pandangan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fontanari (2024) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan upah dan produktivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. IPM mencerminkan capaian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Secara konseptual, pembangunan manusia merupakan inti dari proses pembangunan ekonomi jangka panjang. Sukirno (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal fisik, tetapi juga oleh peningkatan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang sehat, terdidik, dan

memiliki keterampilan yang memadai akan mampu menghasilkan output yang lebih tinggi dan bernilai tambah.

Pengaruh positif IPM terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Pendidikan yang lebih baik memungkinkan tenaga kerja untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja, sementara kesehatan yang baik meningkatkan efisiensi dan kapasitas tenaga kerja (Utami, 2020).

Dalam konteks Jawa Timur, peningkatan IPM mencerminkan perbaikan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perkotaan dan Kawasan industri. Kondisi ini berkontribusi pada terciptanya tenaga kerja yang lebih kompetitif dan siap menghadapi perubahan struktur ekonomi, termasuk pergeseran menuju sektor yang lebih produktif dan berbasis teknologi.

Periode penelitian 2019-2023 menunjukkan bahwa peran IPM menjadi semakin penting, terutama pada fase pemulihan ekonomi pasca pandemi. Daerah dengan IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap guncangan ekonomi, baik melalui fleksibilitas tenaga kerja maupun kemampuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi baru (Suryahadi *et al.*, 2020)

Suryahadi *et al.*, (2020) menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam meredam dampak krisis ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Daerah dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih relatif lebih cepat pulih karena tenaga kerjanya mampu beralih ke sektor atau jenis pekerjaan yang lebih adaptif terhadap kondisi krisis.

Selain berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, IPM juga berperan dalam memperkuat kinerja pasar tenaga kerja. Penelitian Solicha *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas manusia mendorong keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi secara lebih produktif.

Dengan meningkatnya IPM, tenaga kerja tidak hanya lebih banyak berpartisipasi dalam pasar kerja, tetapi juga memiliki peluang yang lebih besar untuk terserap di sektor formal dan berproduktivitas tinggi. Kondisi ini memperkuat kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor informal yang berproduktivitas rendah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan berbagai studi empiris di Indonesia yang menemukan bahwa peningkatan IPM berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian Prayitno & Yustie (2020) serta Sari *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan daerah dengan IPM yang relatif rendah.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan IPM perlu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Tanpa perbaikan kualitas sumber daya manusia, kebijakan ekonomi lainnya, termasuk kebijakan upah minimum dan perluasan

kesempatan kerja, akan memiliki dampak yang terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkelanjutan dan inklusif.

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam pasar tenaga kerja belum tentu mampu mendorong peningkatan output ekonomi secara nyata. Dengan kata lain, peningkatan kuantitas tenaga kerja tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ramadhan & Setyowati (2023) yang menemukan bahwa partisipasi angkatan kerja tidak selalu memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk dalam pasar kerja perlu dilihat tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari kualitas pekerjaan dan sektor tempat tenaga kerja tersebut terserap.

Salah satu penjelasan utama dari tidak signifikannya pengaruh TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dominasi sektor informal dan pekerjaan berproduktivitas rendah. Tingginya TPAK di beberapa kabupaten/kota sering kali mencerminkan tekanan ekonomi rumah tangga yang mendorong penduduk untuk bekerja, bukan karena tersedianya lapangan kerja formal yang produktif. Kondisi ini menyebabkan kontribusi tenaga kerja terhadap output ekonomi menjadi terbatas.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa selama periode penelitian, sebagian besar tenaga kerja di Jawa Timur masih terserap pada sektor informal dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah (BPS, 2024). Pekerjaan di sektor informal umumnya memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi, akses modal, serta peluang peningkatan keterampilan, sehingga nilai tambah yang dihasilkan juga rendah.

Selain dominasi sektor informal, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja turut memperlemah kontribusi TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan rendah cenderung terserap pada sektor berteknologi sederhana dan berupah rendah, sehingga peningkatan jumlah tenaga kerja tidak diikuti oleh peningkatan output yang signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pasar tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan tingkat partisipasi, tetapi juga dengan kualitas sumber daya manusia dan struktur lapangan kerja. Sukirno (2018) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan tenaga kerja yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah, bukan sekadar peningkatan jumlah pekerja.

Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi, peran TPAK menjadi semakin kompleks. Meskipun partisipasi kerja meningkat seiring dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga, banyak tenaga kerja yang kembali masuk ke sektor informal akibat

terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal. Kondisi ini membatasi kontribusi TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Suryahadi *et al.*, (2020).

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Wijaksono *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan TPAK tidak selalu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pekerjaan. Tanpa perbaikan struktur pasar kerja, peningkatan partisipasi justru berpotensi memperbesar sektor informal dan menekan produktivitas agregat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kuantitas tenaga kerja bukan satu-satunya faktor penentu pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output yang bernilai tambah melalui pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang produktif serta peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Tanpa perbaikan kualitas pekerjaan, peningkatan TPAK akan memiliki dampak yang terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah merupakan hasil interaksi kompleks antara kebijakan pasar tenaga kerja dan kualitas pembangunan manusia, bukan dipengaruhi oleh satu variabel secara parsial.

Secara konseptual, hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu dimensi kebijakan. Kebijakan upah, kualitas sumber daya manusia, dan dinamika pasar tenaga kerja saling berkaitan dalam membentuk kinerja ekonomi daerah. Sukirno (2018) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mensyaratkan pengelolaan faktor produksi secara terpadu, termasuk tenaga kerja dan kualitas manusia.

Interaksi simultan antara ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi daerah sangat bergantung pada keseimbangan antar faktor. Kebijakan yang berfokus pada peningkatan pendapatan tenaga kerja tanpa disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia berpotensi menimbulkan tekanan terhadap dunia usaha. Sebaliknya, peningkatan kualitas manusia tanpa dukungan pasar tenaga kerja yang memadai juga tidak akan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Interaksi antara UMK dan IPM memberikan gambaran bahwa dampak kebijakan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Pada daerah dengan IPM yang relatif tinggi, kenaikan UMK cenderung lebih dapat diserap karena didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang lebih baik. Kondisi ini memungkinkan dunia usaha mempertahankan output dan daya saing meskipun biaya tenaga kerja meningkat.

Sebaliknya, pada daerah dengan IPM yang masih rendah, kenaikan UMK berpotensi menimbulkan tekanan biaya yang signifikan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Tanpa dukungan produktivitas yang memadai, kenaikan upah dapat menghambat ekspansi usaha dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan pengupahan perlu diselaraskan dengan upaya peningkatan kualitas modal manusia (Fontanari, 2024).

Interaksi antara TPAK dan IPM juga menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja baru akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila diikuti oleh peningkatan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk terserap di sektor formal dan berproduktivitas tinggi, sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar.

Namun, tingginya TPAK tanpa didukung oleh IPM yang memadai berpotensi menciptakan surplus tenaga kerja di sektor informal. Kondisi ini membatasi kontribusi tenaga kerja terhadap output ekonomi dan menekan produktivitas agregat. Fenomena ini terlihat di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki tingkat partisipasi kerja tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah (Suryahadi *et al.*, 2020).

Hasil simultan penelitian ini juga menegaskan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas memerlukan tenaga kerja yang tidak hanya terserap, tetapi juga produktif dan adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi, termasuk digitalisasi dan pergeseran sektor usaha.

Secara teoritis, temuan dari penelitian ini mendukung pendekatan pembangunan ekonomi yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor kunci. Pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih berkelanjutan apabila kebijakan pasar tenaga kerja dan pembangunan manusia dirancang secara terintegrasi dan saling mendukung (Sukirno, 2018).

Dalam konteks pembangunan regional, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Prayitno & Yustie (2020) serta Sari *et al.*, (2024) yang menunjukkan bahwa daerah dengan kebijakan pembangunan manusia yang kuat dan pasar tenaga kerja yang relatif sehat cenderung memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

Implikasi simultan ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi daerah tidak dapat bersifat sektoral atau parsial. Pemerintah daerah perlu mengkombinasikan kebijakan upah minimum yang lebih adaptif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara kebijakan pengupahan, pembangunan manusia, dan penguatan pasar tenaga kerja merupakan prasyarat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkelanjutan. Pendekatan kebijakan yang terintegrasi akan lebih efektif dibandingkan kebijakan yang berdiri sendiri dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019–2023, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara signifikan oleh faktor pasar tenaga kerja dan kualitas pembangunan manusia. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi regional tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu variabel secara parsial, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor struktural yang saling berkaitan dan membentuk kinerja ekonomi daerah secara keseluruhan.

Secara parsial, Upah Minimum Kabupaten/Kota terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan peningkatan upah yang tidak diiringi oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja berpotensi menimbulkan tekanan terhadap dunia usaha, terutama pada daerah yang didominasi oleh sektor padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya biaya produksi yang pada akhirnya menghambat ekspansi usaha dan penyerapan tenaga kerja, sehingga berimplikasi pada melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, kebijakan pengupahan perlu dirancang secara lebih proporsional dan adaptif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta karakteristik masing-masing wilayah.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Daerah dengan tingkat IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih terampil, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan manusia tidak hanya menjadi tujuan pembangunan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi belum tentu mampu meningkatkan output ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kualitas pekerjaan dan tingkat produktivitas yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kuantitas tenaga kerja bukan satu-satunya faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi, melainkan perlu didukung oleh kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan lapangan kerja yang produktif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Timur lebih dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan kuantitas tenaga kerja semata. Interaksi antara kebijakan upah minimum, kualitas pembangunan manusia, dan partisipasi angkatan kerja menjadi faktor penting yang menentukan kinerja ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi antara kebijakan ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Sejalan dengan temuan tersebut, pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan disarankan untuk merumuskan kebijakan upah minimum yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas tenaga kerja, kondisi dunia usaha, serta karakteristik ekonomi masing-masing wilayah. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja perlu menjadi prioritas utama guna meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Upaya pengembangan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri juga menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian daerah.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang relevan seperti investasi, tingkat pengangguran, struktur sektor ekonomi, maupun tingkat kemiskinan, serta memperluas periode dan cakupan wilayah penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif dan mendalam dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan ekonomi di tingkat regional.

REFERENSI

- Amalia, L., Putri, R., & Aprelia, R. (2024). Pengaruh IPM, UMK, Pertumbuhan Ekonomi dan TPAK terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah. *Independent: Journal of Economics*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.65018>
- BPS, Jatim. (2021). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,74 persen*. <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2021/11/05/1238/the-open-unemployment-rate--tpt--is-5-74-percent.html>
- Comola, M., & de Mello, L. (2017). Minimum Wages and Labour Market Outcomes: Evidence from Indonesia. *Applied Economics*, 43. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9353.2011.00535.x>
- Faruq, M. A. (2024). HATTA: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Volume 2 (1) Pengaruh Modal Manusia dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *HATTAA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 1(April), 1–10.
- Fontanari, C. (2024). The role of wages in triggering innovation and productivity: A dynamic exploration for European economies. *Economic Modelling*, 130. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106571>
- Jatim, B. P. S. (2021). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,74 persen*. <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2021/11/05/1238/the-open-unemployment-rate--tpt--is-5-74-percent.html>
- Lichter, A., Peichl, A., & Siegloch, S. (2015). The own-wage elasticity of labor

- demand: A meta-regression analysis. *European Economic Review*, 80, 94–119.
<https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2015.08.007>
- Magruder, J. . (2019). The Impact of Minimum Wage Increases on Indonesian Small and Medium Enterprises. *World Bank Economic Review*, 27, 278–310.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/wber/lhs031>
- Prayitno, B., & Yustie, R. (2020). Pengaruh Tenaga Kerja, IPM Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota Di Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16(1), 47.
<https://doi.org/10.30742/equilibrium.v16i1.825>
- Putri, R. N., & Hanifa, N. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 4(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.65963>
- Rabbani, A. S., & Hasmarini, M. I. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum dan Jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 2017-2021. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4537–4543.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4346>
- Ramadhan, B. A., & Setyowati, E. (2023). Analisis Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten Tahun 2017-2021. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 82–89.
<https://doi.org/10.31253/pe.v21i3.2065>
- Sari, Miftahul Habib, Refta Ardiansyah, & Muhammad Kurniawan. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 2(2), 92–106.
<https://doi.org/10.59841/excellence.v2i2.1320>
- Solicha, F. A., Agustin, I. D., Efendi, S. P. W., Ariesetyawan, K., & Nilasari, A. (2024). Pengaruh IPM dan UMK Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Tengah. *Independent: Journal of Economics*, 4, 60–67.
- Solihah, N., & Ariesetyawan, K. (2025). Pengaruh Upah, Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Jawa Varat. *Independent: Journal of Economics*, 5(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/independent.v5i1.66724>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sukirno, S. (2018). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Edisi Keti). PT. RajaGrafindo Persada.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Utami, F. P. (2020). The Effect of Human Development Index (IPM), Poverty and

Unemployment on Economic Growth in Aceh Province. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 101–113.
https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/5846/3104

Wijaksono, R. A., Syafitri, W., Pembangunan, E., & Ekonomi, F. (2023). *Artikel+9+Volume+2+Nomor+4*. 2(4), 814–826.

Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (6th ed.).